

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Allivia Putri Gandini, Kebijakan Kriminalisasi Obstruction Of Justice Sebagai Delik Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018).

Andi Hamzah, Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991).

Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Media Hukum Pidana Nasional dan Internasional, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

Bambang Purnomo, Potensial Kejahatan Korupsi di Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara, 1983).

Barda Nawawi Arif , Sari Kuliah Hukum Pidana II, (Semarang: Fakultas Hukum Undip, 1984).

Barda Nawawi Arief, Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia (Perspektif Perbandingan Hukum Pidana), (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2010).

Direktorat Penelitian dan Pengembangan Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Anti Korupsi di Luar Negeri (Deskripsi Singapura, Hongkong, Thailand, Madagascar, Zambia, Kenya dan Tanzania), 2006, (Jakarta: 2006).

- Endarto, Kendala KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Jurnal Lingkar Widyaiswara, Edisi 1 No. 3, (Banten: Badan Diklat Provinsi Banten, 2014).
- Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi bersama KPK, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- I Made Widnyana, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta:vPT. Fika Hati Aneska, 2010).
- Jupiter Zalukhu, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum (Obstruction Of Justice) Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan MA No. 684 K/Pid.Sus/2009), Skripsi (Medan: Fakultas Hukum USU, 2018)
- Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi), (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993).
- M. Cherif Bassiouni, Substantive Criminal Law, (Springfield: ThomasPublisher, 1978).
- Moeljatno, Asas – asas Hukum Pidana, Cet. Kedelapan, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995).
- P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1997).

Pujiyono, Tindak Pidana Korupsi, (Tangerang: Universitas Terbuka-Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi, 2017)

Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme, (Bandung: Bina Cipta, 1996).

Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016).

Shinta Agustina, dkk, Obstruction Of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi, (Jakarta Selatan: Themis Books, 2015).

Sudarto, Hukum Pidana Edisi Revisi, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2009).

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana, (urakarta : Fakultas Hukum UMS, 2005).

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001. tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Internet

<http://cegahkorupsi.wg.ugm.ac.id/index.php/fakta-korupsi>.

<https://hukum.tempo.co/read/1050153/maqdir-ismail-anggap-kpk-tak-berwenang-tahan-fredrich-yunadi>.

Bubarkan Pengadilan Tipikor Daerah, Pilihan Politik Hukum,

<http://nasional.kompas.com/read/2011/11/04/22330494/Bubarkan.Pengadilan.Tipikor.Daerah.Pilihan.Politik.Hukum>.

Sugeng Triyono, 2013, *Sembunyikan Istri Nazarudin WN Malaysia divonis 7 Tahun*, <http://news.liputan6.com/read/527562/sembunyikan-istri-nazaruddin-wn-malaysia-divonis-7-tahun>. .

<http://akperrsdustira.ac.id/wp-content/uploads/2017/07/Buku-Pendidikan-Anti-Korupsi-untuk-Perguruan-Tinggi-2017-bagian-3.pdf>.